

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki suatu daerah untuk mengurus dan mengawasi urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 memuat peraturan mengenai hal tersebut. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi yang berarti memberikan otonomi lebih besar kepada Daerah Otonom dalam menangani urusan dalam negeri.

Ada beberapa subjek yang menarik dan penting untuk diteliti mengenai interaksi antara pemerintah federal dan lokal. Pemerintahan masing-masing daerah lebih banyak berada di tangan pemerintah daerah sejak tahun 1999 ketika otonomi daerah mulai berlaku. Namun hal ini juga mempersulit koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Alokasi kekuasaan dan sumber daya, kerja sama dalam perancangan dan pelaksanaan program, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan beberapa permasalahan utama yang sering muncul dalam interaksi pusat-daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika hubungan antara pemerintah pusat serta daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi penting supaya

dilaksanakan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi perbaikan serta penguatan relasi pusat-daerah di masa mendatang.

Kinerja keuangan daerah adalah bagian penting dari akuntabilitas organisasi dan manajemen yang dinilai oleh masyarakat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah, yang sudah mempunyai otoritas guna mengatur diri mereka sendiri, masih diawasi oleh pemerintah pusat. Didapatinya hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah adalah salah satu contoh hubungan yang ada antara keduanya. Ini terbukti dari pembiayaan guna pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial masyarakat. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada masyarakat, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan APBD kepada masyarakat. Melainkan dapat memperlihatkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomi, efektif, serta efisien, akuntabilitas tidak cukup. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, masyarakat menilai kinerja keuangan daerah sebagai bagian penting dari akuntabilitas organisasi dan manajemen. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah, yang sudah memiliki otoritas untuk mengatur diri mereka sendiri, masih diawasi oleh pemerintah pusat.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki peran dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kewenangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagaimana pelaksana fungsi auditif yang berfungsi guna mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah supaya

meraih tujuan bernegara. Pemeriksaan merujuk pada proses mengidentifikasi masalah, menganalisis, serta mengevaluasi secara independen, objektif, serta profesional menurut standar pemeriksaan guna menilai kebenaran, ketepatan, kredibilitas, serta keandalan informasi terkait pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Setiap hasil pemeriksaan yang dilangsungkan oleh BPK disusun serta disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera sesudah pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan bakal menghasilkan opini. Salah satu jenis Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merujuk pada laporan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, yang mengungkapkan temuan audit BPK terkait ketidakpatuhan pemerintah daerah pada peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

Pada penelitian (Mustikarini dan Fitriasarri, 2012) dan (Sudarsana, 2013) menemukan bahwasanya isi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemda kabupaten/kota sangat bergantung pada tugas dan karakteristik pemerintah daerah. Menurut (Mustikarini dan Fitriasarri, 2012), ukuran daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, dan temuan audit BPK memengaruhi kinerja pemda; namun, (Sudarsana, 2013) mengungkapkan bahwasanya ukuran daerah belum memengaruhi kinerja pemda. Pada penelitian ini, variabel yang dipergunakan termasuk ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, serta tinjauan. Penelitian ini dilangsungkan kembali diakibatkan asil penelitian sebelumnya masih berbeda dari yang diuraikan.

Rohman dan Nugroho (2012) menyelidiki hubungan antara belanja modal dan peningkatan kinerja keuangan dengan menggunakan PAD sebagaimana variabel intervensi. Penelitian ini merujuk pada studi sebelumnya oleh Florida (2007), yang melibatkan keseluruhan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan mempergunakan metode dokumentasi dengan data yang diambil pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2010. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya belanja modal mempunyai dampak negatif langsung yang signifikan pada kinerja keuangan. Namun, secara tidak langsung, melalui Pendapatan Asli Daerah, belanja modal memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian (Julitawati, 2012) melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Populasi penelitian adalah 23 kabupaten/kota yang mempunyai data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2009 hingga 2011. Penelitian ini memanfaatkan metode sensus guna menyelidiki dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dipengaruhi secara simultan serta parsial oleh PAD serta Dana Perimbangan, masing-masing. Riset ini mempergunakan model regresi linear berganda.

Tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh Wenny (2012) yakni guna mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD kabupaten serta kota di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2005 hingga 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini mempergunakan analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya PAD secara keseluruhan mempengaruhi kinerja keuangan, tetapi hanya PAD lain yang sah yang memiliki pengaruh dominan secara parsial. Pajak, retribusi, serta hasil perusahaan serta kekayaan daerah belum menunjukkan pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Kusumawardani (2012), didapati temuan bahwasanya faktor-faktor seperti ukuran, kemakmuran, kekuatan, dan ukuran legislatif secara kolektif berkontribusi sebesar 31,5% pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara spesifik, penelitian tersebut mengungkapkan bahwasanya pengaruh ukuran serta kekuatan legislatif memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, sementara dampak ukuran dan kemakmuran tidak terbukti signifikan.

Harumiati dan Payamta (2014) melaksanakan studi untuk meneliti dampak karakteristik pemerintah daerah serta hasil Audit BPK pada kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun anggaran 2011. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, ditemukan secara

umum kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia berada pada tingkat yang baik. Melalui analisis regresi linear dengan menggunakan SPSS, diketahui bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal (BM), serta temuan audit (TEMUAN) memiliki pengaruh signifikan pada kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Namun, variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) serta status daerah (STATUS) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Pada tingkat signifikansi 5%, variabel-variabel ini hanya menunjukkan pengaruh signifikan.

Penelitian yang dilangsungkan oleh Kusuma (2017) bertujuan guna menginvestigasi bagaimana karakteristik pemda misalnya ukuran, kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, leverage, serta belanja daerah memengaruhi kinerja keuangan pemda. Pengaruh variabel-variabel ini diukur dengan menggunakan rasio efisiensi kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran pemda, tingkat ketergantungan oleh pemerintah pusat, serta leverage tidak mempunyai dampak signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan uji R^2 . Sebaliknya, analisis memperlihatkan bahwasanya kemakmuran serta belanja daerah berdampak signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti yang diindikasikan oleh hasil uji t. Variabel independen pada penelitian ini menjelaskan sebesar 35,5% variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan 64,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum diteliti pada penelitian ini.

Berikutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Rustianingsih (2014) menginvestigasi faktor yang memiliki dampak pada kinerja pemda. Variabel yang dipertimbangkan meliputi ukuran daerah, pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, jumlah penduduk, serta hasil temuan audit BPK. Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai data lengkap termasuk neraca daerah, laporan hasil audit BPK, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta jumlah penduduk. Dengan menerapkan analisis regresi linear berganda, penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, ukuran daerah, PAD, belanja daerah, pinjaman, Dana Alokasi Umum, jumlah penduduk, serta temuan audit BPK secara signifikan memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Secara khusus, PAD dan jumlah penduduk mempunyai dampak parsial yang pada kinerja pemerintah daerah, sementara variabel lainnya belum memperlihatkan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan ketujuh penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Persamaan dapat dilihat pada hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasisi (2012) dan Rohman dan Nugroho (2012) yang sama-sama menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah. Persamaan juga dapat dilihat pada hasil penelitian dari Julitawati (2012) dan Wenny (2012) dan Rustianingsih (2014) yang menunjukkan bahwa Pendapatan

Asli Daerah secara simultan serta parsial berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Selain itu, terdapat penelitian dari Harumiati dan Payamta (2014) dan penelitian dari Kusumawardani (2017) tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari pengelompokkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa terjadi perbedaan hasil penelitian atau *research gap*.

Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengeksplorasi bagaimana ukuran geografis suatu daerah, tingkat kekayaan daerah tersebut, tingkat ketergantungan pada pusat, serta hasil audit berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah, yang diukur dengan rasio efisiensi kinerja di tingkat provinsi.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian diatas, maka rumusan permasalahan diantaranya yakni:

1. Apakah Ukuran Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
2. Apakah Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
3. Apakah Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
4. Apakah Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
4. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun guna membagikan gambaran umum terkait rencana penulisan skripsi yang bakal dilaksanakan. Skripsi terdiri dari lima bab, serta berikut merupakan ringkasan konten dari masing-masing bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri atas empat bagian. Bagian pertama yakni latar belakang masalah, yang membahas alasan dan argumen yang mendasari pelaksanaan penelitian ini. Bagian kedua adalah rumusan masalah, yang membahas proses merumuskan pertanyaan penelitian. Bagian ketiga mencakup tujuan serta manfaat penelitian, yang membahas tujuan yang ingin diraih serta manfaat

serta hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Sedangkan bagian keempat adalah sistematika penulisan, yang membahas struktur penulisan yang dipergunakan pada penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka terdiri dari empat subbab. Subbab pertama berisi landasan teori yang mencakup teori-teori sebelumnya yang dipergunakan sebagaimana dasar teoretis dalam pelaksanaan penelitian. Subbab kedua membahas penelitian terdahulu, yang memuat ringkasan singkat dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Subbab ketiga menjelaskan kerangka pemikiran, yang menggambarkan hubungan antarvariabel dalam penelitian. Subbab keempat berfokus pada perumusan hipotesis, yang didasarkan pada landasan teori serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian terdiri dari lima subbab. Subbab pertama adalah variabel penelitian serta definisi operasional yang menguraikan pengertian dan cara pengukuran masing-masing variabel. Subbab kedua membahas populasi dan sampel, menjelaskan proses pemilihan sampel penelitian. Subbab ketiga membahas jenis serta sumber data, menjelaskan asal-usul data yang digunakan. Subbab keempat menjelaskan metode pengumpulan data, menguraikan proses pengumpulan data dari berbagai sumber.

Subbab terakhir adalah metode analisis yang menguraikan alat-alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan analisis dibagi menjadi tiga subbab, yakni subbab hipotesis pertama, hipotesis kedua, serta hipotesis ketiga. Masing-masing subbab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil dari tiap hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari tiga subbab, yaitu kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Subbab kesimpulan menyajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis yang sudah dilangsungkan sebelumnya. Subbab keterbatasan membahas lingkup penelitian serta kendala yang dihadapi peneliti selama proses penelitian. Subbab saran berisi rekomendasi konstruktif untuk penelitian di masa mendatang.